



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Juli 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAIZAL THAYEB
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 423406

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **9.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 772 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 905 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **830.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER PRADO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **346.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.511.227.805
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	13.637.227.805
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.637.227.805

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.